

ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Zeni Musfiroh¹, Winda Agustina², Kharisma Putri Aprilia³, Fatmawati Wulan Pratiwi⁴, Novi Khoiriawati⁵
Akuntansi Syari`Ah, Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
Email : zenimusfiroh3@gmail.com¹, whindaagustina1212@gmail.com², kharismaaorilia525@gmail.com³,
wati90172@gmail.com⁴, novi_khoiriawagi@ymail.com⁵

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran daerah memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Tulungagung menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam pengelolaan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, studi pustaka, serta analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peraturan daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam pengelolaan APBD diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, keterlambatan penetapan APBD, keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran berbasis kinerja, dan kendala infrastruktur teknologi informasi, jadi diperlukan strategi seperti optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan pengembangan sektor potensial, penguatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan sistem SIPD, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta memperkuat kemandirian fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kualitatif dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat, DPRD, dan pelaku ekonomi. Tujuannya adalah menggali persepsi, harapan, dan peran aktif mereka dalam perencanaan dan pengawasan APBD, guna menciptakan tata kelola anggaran yang lebih inklusif dan responsif.

Kata kunci

APBD, PAD, pengelolaan keuangan daerah, tantangan dan strategi.

ABSTRACT

The management of regional budgets plays a vital role in improving public welfare and promoting sustainable development. Tulungagung Regency faces various complex challenges in managing its Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the challenges and strategies in the management of the APBD in Tulungagung Regency. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The data analysis technique is based on the interactive model of Miles and Huberman, which consists of three main stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. Data were collected through documentation, literature review, and secondary data analysis sourced from official documents such as the APBD, local regulations, data from the Central Bureau of Statistics (BPS), and local government performance reports. The findings reveal several challenges in APBD management, including suboptimal local revenue (PAD), delays in APBD ratification, limited capacity of government officials in managing performance-based budgeting, and infrastructure constraints in information technology. Therefore, strategies are needed such as

optimizing PAD through tax digitalization and the development of potential sectors, strengthening coordination between the legislative and executive branches, enhancing the capacity of government officials through training on the SIPD system, and improving information technology infrastructure. These strategies are expected to create a more transparent, accountable, and efficient budget management system, as well as strengthen fiscal independence to support sustainable development in Tulungagung Regency. For future research, it is recommended to conduct a qualitative study using a participatory approach that involves local stakeholders, including the community, the Regional House of Representatives (DPRD), and economic actors. The objective is to explore their perceptions, expectations, and active roles in the planning and monitoring of the APBD in order to create a more inclusive and responsive budget governance system.

Keywords

APBD, PAD, Regional Financial Management, Challenges And Strategies.

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat utama untuk merencanakan serta mengatur keuangan di tingkat daerah. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang efisien, penting untuk memperhatikan peran utama anggaran kas dalam proses penyusunan APBD. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Tulungagung berfungsi sebagai unit pelaksana kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan serta pengelolaan anggaran kas yang efisien agar sumber daya keuangan dapat digunakan secara maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD merupakan instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan fungsi perencanaan dan fungsi otorisasi APBD sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2007), yaitu sebagai pedoman kegiatan dan dasar hukum bagi penerimaan dan pengeluaran daerah. Divisi perencanaan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan APBD dapat menggambarkan proses pengambilan keputusan secara efisien dan tepat sasaran.

Langkah-langkah perencanaan anggaran juga harus melibatkan masyarakat, guna menjamin bahwa pengeluaran daerah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai prioritas pembangunan. Fungsi pengawasan dalam APBD memberi ruang bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar, terutama ketika anggaran diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sumber pendanaan pembangunan sendiri berasal dari berbagai komponen pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal karena berasal dari potensi ekonomi lokal seperti pajak dan retribusi daerah. Agar PAD dapat meningkat, daerah perlu memperbaiki sistem administrasi pajak dan menggali potensi ekonomi secara maksimal.

Dengan berkurangnya tingkat sentralisasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat atas transparansi, maka sistem pengelolaan keuangan daerah harus mampu memperkuat ekonomi dan efisiensi birokrasi. Dana Perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bagi hasil pajak dan retribusi, menjadi sumber penting namun seringkali menimbulkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Tulungagung, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Handayani & Fiemansyah, yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal yang terbatas serta rendahnya inovasi dalam pemungutan PAD menjadi

hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk mengembangkan strategi fiskal yang mandiri dan berkelanjutan.

Berbagai tantangan juga muncul dalam pengelolaan anggaran kas, termasuk ketidakjelasan alokasi dana yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan program. Dalam hal ini, fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD menjadi relevan, karena APBD seharusnya mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi, dan menjamin pembagian sumber daya yang adil. Hasil penelitian Yuliana dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah di Kabupaten Tulungagung masih belum optimal, khususnya pada sektor pembangunan, serta struktur pendapatan yang masih sangat bergantung pada dana transfer. Ini mengindikasikan bahwa daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi APBD secara maksimal. Maka dari itu, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran menjadi penting, terutama untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah perlu memastikan laporan pelaksanaan APBD disusun secara efisien dan terbuka kepada publik. Pendapatan Lain-lain yang Sah seperti hibah atau bantuan luar, meski membantu menambah pendapatan, bersifat tidak tetap dan rentan terhadap kebijakan pemberi. Oleh karena itu, ketergantungan pada sumber ini perlu dikurangi, dan fokus harus diarahkan pada penguatan struktur PAD. Strategi pengelolaan pendapatan, seperti yang disarankan dalam penelitian Rahmawati, meliputi penguatan sistem pemungutan pajak daerah, digitalisasi layanan, serta kolaborasi antarlembaga. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Tulungagung dalam mengoptimalkan potensi daerah dan mendukung APBD yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Anggaran untuk pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat merealisasikan APBD dengan efektif, cepat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan strategi yang tepat dan penguatan kapasitas fiskal, Kabupaten Tulungagung dapat mengatasi tantangan pengelolaan APBD serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan APBD di Tulungagung, dengan fokus pada pemahaman tantangan yang ada serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara pengelolaan APBD di Kabupaten Tulungagung serta menilai apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan pada pengelolaan keuangan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah dan pendekatan yang ada dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Tulungagung. Menurut Moleong, Lexy J (2019) Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks dengan fokus pada makna, konteks, dan proses. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki laporan anggaran, dokumen kebijakan, dan berbagai sumber data sekunder

untuk mengetahui bagaimana kebijakan anggaran dibuat dan diterapkan, serta masalah yang muncul selama proses tersebut.

Menurut Sugiyono (2021) Data sekunder adalah data yang sebelumnya tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, data sekunder digunakan karena berfokus pada analisis dokumen dan informasi yang telah dipublikasikan secara resmi. Sumber data sekunder meliputi: Artikel, jurnal, berita serta laporan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, studi pustaka, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti dokumen APBD, peraturan daerah, dan data dari Badan Pusat Statistik, serta laporan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan dengan cara mengurangi, menampilkan, dan menarik kesimpulan dari data. Selain itu, sumber informasi yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi masalah aktual yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Tulungagung adalah artikel dari media online yang dapat dipercaya. Dengan menggabungkan berbagai sumber data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan menyeluruh tentang masalah dan pendekatan yang terkait dengan pengelolaan anggaran daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Tulungagung, seperti halnya di banyak daerah lainnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan, tidak hanya mencakup pendapatan yang diterima daerah, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Dalam pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Tulungagung pastinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berdampak langsung terhadap proses pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran tersebut. Dengan merujuk pada sejumlah data dan sumber yang telah dikumpulkan, studi ini menguraikan beberapa tantangan utama yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan anggaran daerah secara optimal.

a. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan APBD

Di Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Daerah secara terbuka menyampaikan bahwa menjelang akhir semester pertama tahun anggaran 2024, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan APBD. Upaya pengoptimalan ini menjadi semakin penting mengingat tingkat ketergantungan Kabupaten Tulungagung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas penyerapan anggaran. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas. Berdasarkan data dari *Jurnal Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JMIE)* Volume 5 Nomor 2

Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PPMI, diketahui bahwa rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 - 2023 mencapai 73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga dari total pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tulungagung dikategorikan rendah, dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat "konsultatif". Artinya, pemerintah daerah belum mampu secara mandiri merancang kebijakan anggaran yang sepenuhnya lepas dari pengaruh pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada fleksibilitas anggaran dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang bergantung pada ketepatan waktu dan jumlah dana transfer.

Tabel 1. Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi PAD (Rp)
2020	± 2,543 triliun	± 510,55 miliar	± 20,07%
2021	± 2,754 triliun	± 953,89 miliar	± 34,63%
2022	± 2,914 triliun	± 577,54 miliar	± 19,82%
2023	± 2,842 triliun	± 719,58 miliar	± 25,31%
2024	± 2,899 Triliun	± 776 Miliar	± 26,7%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data kontribusi PAD Kabupaten Tulungagung selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi PAD hanya sekitar 24,42% terhadap total pendapatan daerah. Angka ini, jika disandingkan dengan pengkategorian skala interval derajat desentralisasi yang bersumber dari jurnal oleh Natalia Mega Selvi dan Mega Tunjung Hapsari (2022), berada pada kategori "cukup" (20,01% – 30,00%). Namun, jika dikaitkan dengan rasio kemandirian keuangan, kontribusi PAD ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Tulungagung masih tergolong "rendah sekali" (instruktif) karena berada pada rentang 0,00% – 25,00%. Hal ini memperkuat pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung bahwa tantangan utama di akhir semester pertama tahun anggaran 2024 adalah belum optimalnya PAD dalam mendukung APBD. Dengan demikian, meskipun PAD Tulungagung menunjukkan tren kenaikan, tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah dan pola hubungan pemerintah pusat dengan daerah tetap bersifat konsultatif, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dan menekan ketergantungan pada dana transfer pusat. Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat dari tabel diatas Tulungagung menunjukkan peningkatan, tetapi belum cukup signifikan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Mengacu pada data resmi dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, target PAD tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp776 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian karena penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Tulungagung dalam laporan Antara Jatim (2024). Namun demikian, PAD tersebut hanya berkontribusi sekitar 26,7% terhadap total pendapatan daerah yang mencapai Rp2,899 triliun, sebagaimana tercatat dalam dokumen perubahan APBD 2024. Rasio ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan lokal masih belum tergali secara optimal, dan belum mampu menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan.

b Keterlambatan dalam Penetapan APBD Kabupaten Tulungagung

Keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Tulungagung telah menjadi masalah yang menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Sebagai contoh, keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023, yang baru disahkan pada tanggal 20 Desember 2023, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi dan administrasi anggaran. Seharusnya, APBD disahkan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, yaitu pada akhir November. Namun, dengan Perda APBD 2023 yang baru disahkan menjelang akhir Desember, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Dampaknya, penyerapan anggaran menjadi tidak optimal, karena waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lebih singkat dan terbatas. Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas penggunaan dana publik, tetapi juga menghambat capaian target pembangunan yang telah disusun sejak awal tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan ini antara lain panjangnya proses legislasi antara eksekutif dan legislatif, perubahan kebijakan yang memerlukan revisi anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menangani proses penyusunan anggaran.

c Kapasitas Aparatur yang Terbatas dalam Mengelola Anggaran Berbasis Kinerja

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting berbasis SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), implementasinya di lapangan masih belum optimal, hal ini juga merupakan sebuah tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Meskipun Kabupaten Tulungagung telah berupaya untuk menerapkan sistem digital ini sejak tahun 2019 untuk mendukung penyusunan APBD yang lebih transparan dan efisien, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi. Dalam penerapan sistem ini terdapat tantangan seperti kurangnya kapasitas aparatur daerah dalam mengelola dan merancang anggaran berbasis kinerja menggunakan sistem ini. Meskipun pelatihan telah diberikan, namun sebagian besar pegawai masih merasa kurang siap untuk beralih dari sistem manual ke digital. Kurangnya pemahaman mendalam tentang penggunaan sistem SIPD menyebabkan banyak pegawai kesulitan dalam mengoperasikan sistem e-budgeting secara optimal. Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

d Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran di Tulungagung misalnya dalam pengimplementasian SIPD di Tulungagung. Di beberapa daerah, koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai membuat pelaksanaan sistem ini menjadi terhambat. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, masalah teknis ini tetap menjadi kendala yang signifikan dalam proses pengelolaan anggaran.

3.1 Strategi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung

Setelah menganalisis beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung, diperlukan strategi yang komprehensif dan terarah.

- a Untuk mengatasi rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, strategi optimalisasi pendapatan lokal perlu ditingkatkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Pemerintah daerah dapat memperluas cakupan objek pajak serta meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap wajib pajak guna meminimalisasi kebocoran pendapatan. Digitalisasi sistem perpajakan juga menjadi langkah penting dengan mengembangkan sistem informasi perpajakan daerah berbasis teknologi yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat menggali potensi ekonomi lokal seperti sektor pariwisata, UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai sumber PAD baru. Pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, seperti tanah dan bangunan milik pemerintah, juga menjadi langkah potensial untuk menambah pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah menargetkan sektor pariwisata dan retribusi parkir sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta menggali potensi sektor lain yang dapat menunjang peningkatan PAD.
- b Keterlambatan dalam penetapan APBD yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dapat diatasi melalui penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Penjadwalan pembahasan APBD harus mengikuti kalender fiskal nasional dan dikawal ketat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penegakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga diperlukan sebagai bentuk kontrol atas kedisiplinan penyusunan anggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas legislatif dalam menganalisis dan membahas dokumen anggaran juga sangat penting, agar proses legislasi tidak terhambat oleh kurangnya pemahaman teknis.
- c Dalam konteks peningkatan kapasitas aparatur, Pelatihan teknis yang bersifat praktis mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sistem digital seperti SIPD perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis indikator output dan outcome yang terukur akan membantu menjadikan anggaran lebih berorientasi pada hasil. Pemerintah juga dapat menerapkan sistem insentif bagi OPD yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis reward and punishment. Rekrutmen dan penempatan aparatur juga perlu mempertimbangkan kompetensi teknis, bukan hanya faktor administratif semata.
- d Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan jaringan internet, pengadaan perangkat keras, serta pemeliharaan sistem informasi secara rutin. Kerja sama dengan penyedia layanan teknologi, termasuk BUMN dan swasta, dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mempercepat modernisasi sistem informasi daerah. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi seluruh aparatur melalui pelatihan berkala serta penyediaan pusat bantuan teknis (helpdesk) akan mempermudah transisi dari sistem manual ke digital.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini akan berkontribusi dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat akan

menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan strategi ini. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memperkuat kemandirian fiskalnya guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterlambatan dalam penetapan APBD, keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran berbasis kinerja, hingga kendala infrastruktur teknologi informasi. Ketergantungan fiskal Kabupaten Tulungagung terhadap dana transfer pusat masih tinggi, yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD turut berdampak pada rendahnya efektivitas penyerapan anggaran, sementara kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai turut menghambat implementasi sistem pengelolaan anggaran yang modern dan akuntabel.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk percepatan penetapan APBD, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, memperkuat kemandirian fiskal, dan pada akhirnya mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, T., & Sari, N. M. (2021). "Strategi diversifikasi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). "*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022*." BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2019). "Strategi peningkatan pendapatan asli daerah di era otonomi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 87–96.
- Faw'waz, S. A., & Suriyanto, M. A. (2025). "Analisis strategi bersaing Adam Tour & Travel menggunakan analisis SWOT". *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 1.
- Halim, A. (2007). "*Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*." (Jakarta: Salemba Empat.)
- Handayani, S., & Firmansyah, D. (2020). "*Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal*." *Jurnal Keuangan Daerah*, 3(1), 45–56.
- Jatim Network Tulungagung. (2023, Desember 15). Pelaksanaan APBD Tulungagung 2023 defisit Rp73 miliar lebih: Ini postur lengkapnya. <https://tulungagung.jatimnetwork.com>
- Mardiasmo. (2009). "*Akuntansi sektor publik*." (Yogyakarta: Andi.)

- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). "Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah periode 2019–2023)." *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 2142
- Mulyani, S. R. (2018). "Kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah". *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 35–44.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024]" (Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2023)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Radar Tulungagung. (2024, Januari 5). Isu efisiensi anggaran jadi tantangan bagi Bupati dan Wabup Kabupaten Tulungagung terpilih. <https://radartulungagung.jawapos.com>
- Rahmawati, N. (2021). Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 22–35.
- Selvi, Natalia Mega, dan Mega Tunjung Hapsari, "Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19 (Tahun 2017–2022)," *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Vol.4, No.1, 2023, hal. 205–214
- Siregar, H. (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(2), 120–134.
- Sujarwoko, Destyan H. "Tulungagung Segera Berlakukakan e-Budgeting APBD 2019." *Antaranews Jatim*, 28 Maret 2018. <https://jatim.antaranews.com/berita/251972/tulungagung-segera-berlakukakan-e-budgeting-apbd-2019>.
- Sularso, E., & Restiana, N. (2020). Penguatan pengawasan anggaran sebagai upaya peningkatan kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 89–98.
- Suparmoko, M. (2018). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sutrisno, H. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 105–116.
- Tribunnews Surabaya. "Sekda Tulungagung Tri Hariadi Pimpin Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2024." *Tribunnews Surabaya*, 12 Juni 2024. <https://surabaya.tribunnews.com/2024/06/12/sekda-tulungagung-tri-hariadi-pimpin-evaluasi-dan-percepatan-pelaksanaan-apbd-2024>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yayuk P. & Fitriani, D. (2017). Analisis Hibah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 75–89.
- Yuliana, D., & Prasetyo, A. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Realisasi APBD di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 77–89.
- Yuniasari, Anna, dan Dyah Pravitasari. (2025) "Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung",

Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE) Vol. 2, no. 3 .
<https://doi.org/10.70248/jmie.v2i3.2119>.